

# Mengulas Kontribusi dan Potensi Retribusi Wisata Desa Sebagai Sumber PADes

M. Nizarul Alim<sup>1</sup> Imam Agus Faisol<sup>2</sup> Mohammad Ali Hisyam<sup>3</sup> Habi Bullah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the potential and contribution of retribution from the rural tourism sector, which is correlated with an increase in original village income (PADes). This study uses a qualitative research type. Data collection techniques were carried out by triangulation and inductive data analysis, and qualitative research results emphasized meaning rather than generalization. The research locations are Bukit Kehi Pamekasan village tourism and Kedatim Sumenep Mangrove Tourism. The primary informants of this study were the village head of Kartagenadaya and the village head of Kebun Dadap Timur. Meanwhile, the supporting informants are the Madura tourism association (Asprim) in the Pamekasan area. Potential village fees that can be developed in the two tourist attractions are parking, land rental, entrance, and kiosk/building rental fees. At present, the two villages only focus on entrance fees for tourist attractions and parking fees. The village government, BUMDes and tourism-aware communities (Kopdarwis) need to work together to develop and optimize the potential for retribution for tourism villages which are expected to contribute and increase the original village income (PADes).*

*Keywords: Retribution, Village Tour, PADes*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kontribusi retribusi dari sektor wisata desa yang dikorelasikan dengan peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi penelitian adalah wisata desa Bukit Kehi Pamekasan dan Wisata Mangrove Kedatim Sumenep. Informan utama penelitian ini adalah kepala desa Kartagena daya dan kepala desa Kebun Dadap Timur. Sedangkan, informan pendukung yakni anggota asosiasi pariwisata Madura (Asprim) area Pamekasan. Potensi retribusi desa yang dapat dikembangkan pada dua objek wisata tersebut yaitu retribusi parkir, retribusi sewa lahan, retribusi karcis masuk, dan retribusi sewa kios/bangunan. Saat ini, kedua desa tersebut hanya fokus kepada retribusi karcis masuk objek wisata dan retribusi parkir. Pemerintah desa, BUMDes dan Masyarakat sadar wisata (Kopdarwis) perlu bersinergi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi retribusi desa wisata yang diharapkan dapat berkontribusi dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)

Kata Kunci: Retribusi, Wisata Desa, PADes

## 1. PENDAHULUAN

Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan atas urusan pemerintahan dan pengembangan perekonomian lokal. Konsep membangun bangsa dari desa merupakan formula yang tepat jika pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi mengembangkan segala potensi yang tersedia. Pemerintah desa menurut fungsinya dapat dikaitkan dengan opini Hossein (1993) yang menjelaskan bahwa *local government* mengandung 3 unsur yaitu organ yang terstruktur, memiliki batas kewenangan, sebagai daerah lokal (desa) yang otonomi. Ketiga fungsi tersebut telah menjadi bagian dari pemerintah desa yang menyatu, misalkan desa memilih pemimpin (kepala desa) secara mandiri dengan melibatkan masyarakat, kemudian mengelola sumber daya yang dikuasai untuk kepentingan publik. Kemudian, kedua komponen tersebut dapat dilaksanakan secara otonomi oleh pemerintah desa. Tiga aspek tersebut dapat disinergikan dengan fungsi lain pemerintah desa yaitu sebagai *policy making* dan *policy executing*. Desa melalui kebijakan yang diregulasikan dapat merencanakan dan mengimplementasikan sumber penerimaan baru yang menjadi potensi pendapatan asli desa. Konsep pengembangan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal juga dapat menjadi pilihan terbaik dan realistis. Semua aspek yang mendukung perkembangan dan kemajuan desa dapat disinergikan melalui fungsi yang melekat.

Pemerintah desa sebagai wilayah administratif terkecil mempunyai peranan dalam upaya untuk membangun ekonomi nasional. Salah satu bentuk peran strategis yaitu dengan memberikan kontribusi membangun desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Pemerintah pusat melalui alokasi dana desa dan

dana desa telah diimplemetasikan dan didistribusikan bertujuan untuk membangun negara dari skope terkecil. Meskipun negara telah memberikan dana tersebut, desa dituntut untuk menjadi desa mandiri dan tidak bergantung pada dana desa maupun alokasi dana desa. Desa mandiri dapat diwujudkan jika desa tersebut mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikuasai dan dimiliki. Berharap semua sumber daya tersebut dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang tetap dan berkelanjutan. Desa memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, baik potensi sumber daya alam maupun potensi budaya yang lain.

Desa dapat mengemas dan mengelola setiap potensi sumber daya menjadi sumber penerimaan bagi desa yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Potensi yang sering terlihat adalah potensi alam desa yang dikemas menjadi pariwisata. Salah satu contoh desa yang menjadi desa wisata yaitu Desa Ponggok yang berada di Klaten Jawa Tengah. Destinasi wisata yang ditawarkan adalah wahana wisata mata air (umbul ponggok) dengan memanfaatkan potensi sumber air yang bersih dan jernih. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, badan usaha milik desa (BUMDes), masyarakat dan para pemuda desa dapat dengan mudah untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

Informasi dan gambaran tentang suksesnya membangun dan mengembangkan desa melalui pariwisata dapat menjadi contoh dan acuan bagi desa lain yang sedang mengembangkan wisata desa. Salah satu bentuk strategi mengembangkan wisata desa menurut Muliawan (2008) adalah identifikasi potensi keunikan dan daya tarik wisata, kesiapan fasilitas pendukung, memiliki interaksi dengan pasar, dan adanya dukungan masyarakat. Indikator pengembangan wisata diatas perlu dikaji dan dianalisis sebagai dasar untuk mengembangkan pariwisata agar tujuan yang dirancang dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan. Pembangunan wisata desa akan memberikan *effect* yang signifikan dan cenderung berdampak ganda misalkan dampak pada aspek ekonomi dan sosial. *Multiplier effect* tersebut diharapkan oleh semua pihak terutama pemerintah desa, kelompok pemuda dan tentunya masyarakat yang ada di desa tersebut. Pembukaan lapangan kerja baru, meminimalisir angka pengangguran dan kontribusi terhadap pendapatan asli desa merupakan hal yang wajar atas ekspektasi keberhasilan pembangunan wisata desa.

Aspek penting dari pembangunan wisata yang berkorelasi terhadap pemerintahan desa adalah kontribusi objek wisata yang ada terhadap pendapatan asli desa. Variabel pendapatan asli desa sangat beragam misalkan dari pendapatan dari sewa bangunan/kios pasar milik desa, penerimaan dari tanah kas desa, pendapatan dari sewa gedung olahraga atau gedung pertemuan, atau sumber penerimaan lainnya. Aspek lain yang dapat dijadikan sumber penerimaan baru bagi desa yaitu retribusi parkir, retribusi sewa lahan, retribusi karcis masuk yang nantinya diintegrasikan dengan adanya wisata desa yang menarik pengunjung. *Multiplier effect* akan secara normal terjadi jika semua aspek pengembangan wisata telah direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara berkelanjutan.

Penelitian tentang pengembangan wisata desa telah banyak dilakukan namun yang dikorelasikan dengan pendapatan asli desa masih belum banyak dilakukan. Atmoko (2014) meneliti tentang strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan Kabupaten Sleman, Syah (2017) juga meneliti tentang strategi mengembangkan desa wisata, Sarjanti dkk (2019) meneliti tentang kajian persepsi dan dampak berganda (*multiplier effect*) masyarakat untuk pengembangan pariwisata lembah asri serang di desa serang kecamatan karangreja Kabupaten Purbalingga. Salah satu riset yang relevan dengan topik ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Harsoyo (2021) yang meneliti tentang Analisis potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata Kota Semarang. Mawarni (2013) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, fokus utama penelitian ini adalah mengkesplorasi potensi penerimaan dari sektor retribusi wisata desa yang diharapkan dapat meingkatkan pendapatan asli desa. Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengulas kontribusi, serta potensi pendapatan dari sektor retribusi wisata desa. Peneliti ini juga akan mengkorelasikan potensi dan kontribusi tersebut terhadap peluang peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

## 2. TELAAH LITERATUR

Pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa (Saputra dkk, 2019). Dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk segala proses yang diawali dengan dan

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya desa sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Hermansyah dkk, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa (Dewi dan Irama, 2018). Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keuangan desa terdiri dari semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh dari hak lainnya yang sah.

Sumber pendapatan desa diperoleh dari alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten (Dewi dan Irama, 2018). Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah guna kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi terdiri dari 3, yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Penyediaan dan pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan merupakan pengertian dari retribusi jasa umum. Orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tersebut merupakan subjek retribusi jasa umum, sedangkan mereka yang wajib melakukan pembayaran retribusi disebut wajib retribusi jasa umum, yang didalamnya termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Penetapan tarif retribusi jasa umum memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat serta keadilan dan efektivitas pengendalian dan pelayanan.

Retribusi jasa umum terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil, parkir pada tepi jalan umum, pemakaman, pelayanan pasar, uji kendaraan bermotor, pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan sedot kakus, pengolahan limbah cair, tera dan atau tera ulang, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi jasa usaha

Pelayanan dengan menggunakan dan atau memanfaatkan kekayaan daerah dan juga belum disediakan secara optimal oleh pihak swasta merupakan pengertian dari retribusi jasa usaha. Prinsip yang digunakan adalah komersial dengan subjek retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menggunakan atau menikmati layanan. Penentuan tarif retribusi jasa usaha berdasarkan pada perolehan keuntungan yang layak, yaitu dilakukan secara efisien dan mengacu pada harga pasar.

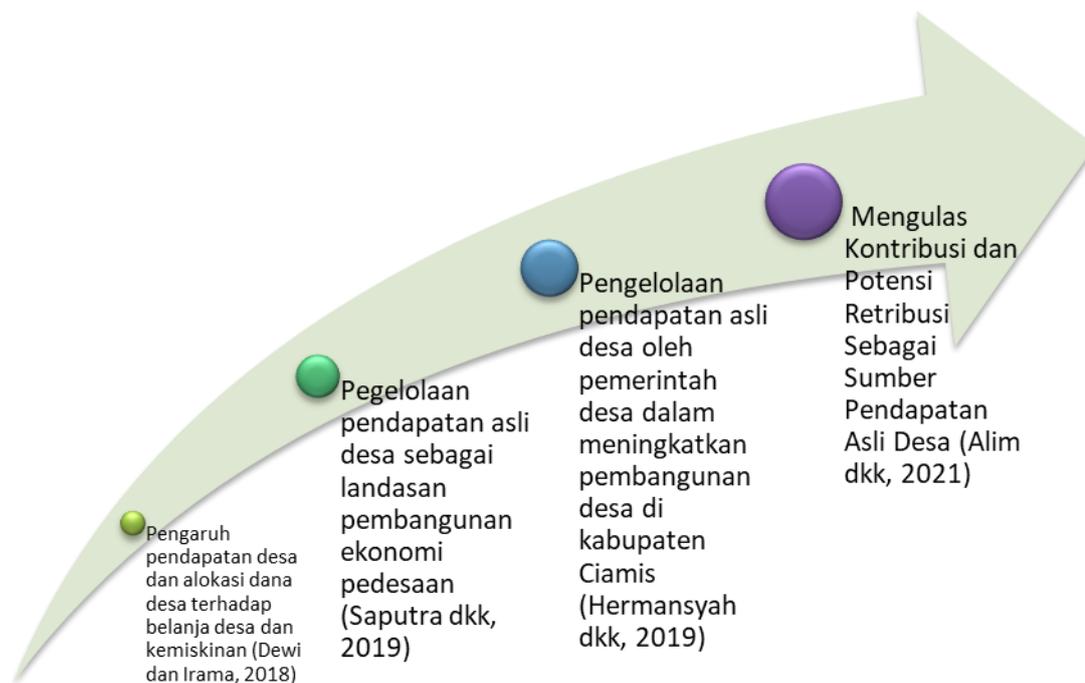
Jenis-jenis retribusi usaha diantaranya, retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, tempat pelanggan, terminal, tempat khusus parkir, penginapan, rumah potong hewan, pelayanan ke pelabuhan, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan melalui air serta penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu

Pelayanan dengan izin tertentu dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan maksud untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu demi menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan merupakan pengertian dari retribusi perizinan tertentu.

Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin, yang diatarannya meliputi penerbitan dokumen perizinan, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, serta dampak negatif dari izin tersebut. Jenis-jenis retribusi ini diantaranya, perizinan mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha dalam bidang perikanan.

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kontribusi dan potensi retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Peneliti telah melakukan kajian tentang pemetaan kontribusi dan potensi retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Peta penelitian dapat dilihat dalam bagan 2.1 ini



Bagan 2.1 Peta Jalan Penelitian

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada obyek yang alamiah serta peneliti adalah sebagai instrument utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi atau makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:9). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi dan persepsi wajib pajak tentang undang-undang cipta kerja klaster perpajakan. Lokasi penelitian adalah wisata desa Bukit Kehi Kabupaten Pamekasan dan Wisata Mangrove Kedatim Sumenep. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan penelitian terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah kepala desa Kartagena daya dan kepala desa Kebundadap Timur. Sedangkan, informan pendukung yaitu anggota asosiasi pariwisata madura (Asprim) area Pamekasan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan informan utama dan informan pendukung. Peneliti juga menggunakan metode observasi yang dilakukan secara langsung dengan melaksanakan tinjauan langsung kepada objek yang dituju. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari 3 tahapan yaitu Peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara terkait dengan potensi retribusi wisata desa. Data yang sudah didapat kemudian direduksi agar memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data selanjutnya. Kemudian, penyajian data penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama observasi dan wawancara. Tujuan penyajian data yaitu untuk mengetahui bagaimana potensi retribusi desa terhadap pendapatan asli desa (PADes). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin saja tidak. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat memberikan simpulan tentang potensi retribusi Wisata Desa.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa berpeluang untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan menjadi wisata desa. Potensi desa tersebut dapat menjadi peluang meningkatkan pendapatan asli desa jika dapat dikemas salah satunya dalam bentuk pariwisata. Desa wisata yang dapat menarik pengunjung berpotensi mendatangkan pendapatan bagi desa melalui skema retribusi atau bentuk lainnya. Penelitian ini memetakan potensi retribusi yang ada di desa wisata berdasarkan jenisnya yaitu retribusi parkir, retribusi karcis masuk wisata desa, retribusi sewa kios/bangunan maupun retribusi sewa lahan.

### Analisis Potensi Restirbusi Parkir

Tempat parkir merupakan hal yang krusial yang perlu disediakan oleh pengelola tempat wisata. Ketersediaan tempat parkir dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Tempat parkir dapat dikelola secara mandiri dengan melibatkan kelompok masyarakat yang berada dalam Kawasan pariwisata. Pemungutan retribusi tentunya harus mengikuti ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa berkewajiban untuk menyediakan peraturan yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir.

Observasi yang dilakukan di wisata Bukit Kehi dan Wisata Mangrove Kedatim mendeskripsikan bahwa aktivitas retribusi atas parkir kendaraan motor dan mobil telah diimplementasikan. Gambar 4.1 menjelaskan bahwa Bukit Kehi menerapkan biaya parkir yang berbeda-beda diantara jenis kendaraan. Kewajaran penetapan tarif dapat dinilai sangat terjangkau oleh masyarakat. Tarif parkir untuk motor di Bukit Kehi sebesar Rp. 2.000, Mobil Rp. 5.000, dan Bus 10.000. Akses Bukit Kehi berlaku sampai dengan pukul 17.00. Wisata Mangrove Kedatim menetapkan tarif parkir yang kurang lebih sama yaitu tarif parkir motor Rp. 3.000 dan tarif parkir mobil Rp. 5.000. Akses wisata mangrove dibuka sampai pukul 21.00.



Gambar 4.1 Tarif Parkir Motor/Mobil

Retribusi Parkir di Wisata Bukti Kehi dikelola secara mandiri oleh kelompok sadar wisata (Kopdarwis) di desa Kartagena Daya Pamekasan, konsep yang sama juga digunakan di tempat Wisata Mangrove Kedatim. Potensi pendapatan dari retribusi parkir pada dua objek wisata tersebut dapat diperhatikan berdasarkan jumlah kunjungan setiap hari. Senada dengan yang disampaikan oleh mas iping selaku asprim kabupaten Pamekasan yang menjelaskan:

“... PPKM kami tutup mengikuti anjuran pemerintah, tapi kalau hari biasa kami itu rame pengunjung, khususnya lebaran, kalau hari seperti sekarang (minggu) lumayan ada, ini habis PPKM alhamdulillah sudah mulai ada orang, kalau waktu PPKM kami dilarang buka.”

Potensi penerimaan dari retribusi parkir berkorelasi dengan intensitas kunjungan para wisatawan. Meningkatnya kunjungan wisatawan akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan oleh kepala desa Kebun Dadap Timur (Kedatim) yang menyatakan:

“Kalo visi dan misi secara ini secara langsung memang tidak masuk tapi visi dan misi disana juga salah satu membantu perekonomian masyarakat masuk juga disana karena otomatis dengan adanya wisata ini membatu perekonomian masyarakat lingkungan contohnya mereka bisa berjualan diluar untuk parkir dikelola rumah tangga otomatis membantu kas rumah tangga.....”

Khusus pada aspek kontribusi terhadap pendapatan asli desa, retribusi parkir dapat menjadi salah satu sumber penerimaan potensial jika dikelola dengan baik dan transparan. Selain aspek ekonomi dan sosial, sumber penerimaan dari retribusi parkir dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan destinasi wisata yang telah ada maupun mengembangkan objek wisata lainnya. Hal penting dari retribusi yaitu, fasilitas tempat parkir yang memadai dan pelayanan juru parkir tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Desa.

### Analisis Potensi Retribusi Karcis Masuk Wisata Desa

Retribusi karcis masuk objek wisata merupakan hal pasti dan merupakan bagian penting dari siklus pengembangan wisata yang berkelanjutan. Penetapan tarif masuk objek wisata merupakan hal krusial dan perlu dipertimbangkan dengan matang. Retribusi ini cukup potensial mengingat dapat membantu pengembangan wisata. Observasi yang dilakukan di wisata Bukit Keki dan Wisata Mangrove Kedatim mendeskripsikan bahwa aktivitas retribusi atas karcis masuk wisata desa telah dilaksanakan dan ditetapkan tarif yang beragam. Gambar 4.2 menjelaskan bahwa Wisata bukti kehi menetapkan tarif karcis masuk sebesar Rp. 4.000/orang, sedangkan wisata Mangrove Kedatim tarif yang digunakan adalah senilai Rp. 10.000/orang.



Gambar 4.2 Tarif Tiket Masuk Wisata Bukit Keki

Penerimaan dari tiket masuk objek wisata taman mangrove kedatim belum bisa berkontribusi terhadap PADes. Saat ini pendapatan yang diterima hanya dapat menutupi biaya operasional setiap bulannya. Seperti yang disampaikan oleh kepala desa Kebun Dadap Timur (Kedatim) yang menjelaskan:

“...Tapi karena ini terus berkembang bulan kedua bisa dibilang biaya operasioanal tidak nutut sama yang ini karena pppm prof kita tetep buka walaupun diwanti sama pihak kepolisian sama tim satgas kita tetep buka tapi karena masyarakat takut karena dari kota-kota banyak cegatan itu akhirnya saya bulan ketiga agak-agak sedikit bulan ke empat sudah lumayan membaik bulan kelima inisudah lumayan kita kn mungkin di hari-hari weekend prof yang lumayan kalo hari-hari biasa mungkin 400 500 bisa tiket masuk.....’

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kepala Desa Kartagena Daya yang menjelaskan:

“Kalau disini masih belum ada (Kontirbusi terhadap bumdes), masih diputar juga uangnya”

Kedua objek wisata tersebut masih belum mampu berkontribusi terhadap PADes. Hal paling mendasar yaitu objek wisata yang relatif baru dan membutuhkan dana untuk pengembangan objek wisata. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 juga menekan dan mengurangi kunjungan wisatawan baik dalam kota maupun luar kota. Sehingga, kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan dari karcis masuk objek wisata turun drastis. Terlepas dari masa pandemi Covid-19, Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kartagena Daya dan Kebun Dadap Timur untuk mengembangkan objek wisata dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dinilai sudah tepat. Keterlibatan kelompok sadar wisata, pemuda desa dan masyarakat sekitar objek wisata adalah langkah tepat untuk membangun sinergi dan semangat mendukung perkembangan wisata desa.

### Analisis Potensi Retribusi Sewa Kios/Bangunan

Ketersediaan fasilitas pendukung dalam membangun wisata merupakan keharusan pemerintah desa. Fasilitas penunjang seperti warung makan, kios yang menjual souvenir, toilet, dan musholla, wajib tersedia dan layak ditempati. Wisata Bukit Keki dan Wisata Mangrove Kedatim masih relatif baru dan dalam proses pengembangan, sehingga ketersediaan kios masih dalam tahap perencanaan. Namun untuk fasilitas toilet dan musholla sudah tersedia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kepala desa Kebun Dadap Timur (Kedatim) yang menyatakan:

“*Planningnya* (ada cafe disana ada gazebo, disetting beberapa tempat2 untuk kios, untuk toko souvenir, dari masterplannya yang jadi diresmi toko kios toko yang nanti jumlahnya katakanlah kayak didestinasikan ada kios toko tempat makan yang diberikan kepada warga untuk entah itu sewa entah itu bagi hasil entah itu retribusi itu bisa memberikan kesempatan tidak hanya diluar tapi ddalam) ada tapi lagi-lagi terbentur sama dana karena dana 400 juta ketika kita membangun sebuah destinasi wisata atas lumpur ini memang sangat besar karena tadi saya sampaikan bahwa pembiayaan itu 3 kali lipat di daratan”

Perencanaan pengembangan fasilitas wisata yang dapat disewakan kepada pihak lain menjadi pilihan menarik sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan asli desa dari sektor wisata. Dua objek wisata desa tersebut masih dalam proses perencanaan dan pengembangan. Konsep sewa menyewa kepada pihak ketiga perlu konsep yang matang dan legalitas yang formal. Selan itu, regulasi atas bangunan/kios yang disewakan perlu disusun dengan mempertimbangkan kearifan local masyarakat desa Kartagena Daya dan Kebun Dadap Timur (Kedatim).

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Potensi retribusi desa mengulas pada dua aspek utama yaitu retribusi yang sudah diimplementasikan dan retribusi yang potensial untuk dilaksanakan. Retribusi yang sudah berjalan yaitu retribusi parkir dan retribusi karcis masuk wisata. Retribusi tersebut belum dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes). Salah satunya disebabkan objek wisata masih dalam tahap pengembangan dan pembangunan sehingga pendapatan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk objek wisata tersebut. Retribusi sewa kios/bangunan dalam kompleks desa wisata merupakan pilihan menarik bagi pemerintah desa untuk dikembangkan sebagai potensi baru bagi pendapatan asli desa.

Informan penelitian ini fokus pada dua objek wisata yang masih dalam tahap pengembangan sehingga data yang diperoleh belum menjelaskan secara keseluruhan mengenai potensi pendapatan pada setiap objek wisata. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih objek penelitian/objek wisata yang telah berkembang pesat dan bukan dalam tahap perencanaan atau pengembangan. Sehingga data yang didapatkan lebih komprehensif dan dapat menjelaskan potensi kontribusi retribusi terhadap PADes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, T Prasetyo Hadi. 2014. Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata*, Volume 12 Nomor 2.
- Firmansyah, A., & Yunidar, A. 2020. Financial derivatives, financial leverage, intangible assets, and transfer pricing aggressiveness: evidence from Indonesian companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 1-12. [httpdx.doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334](http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334)
- Dewi, Ratna Sari dan Ova Novi Irama. 2018. Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 5. No. 2.)
- Sarjanti, Esti dkk. 2019. Pengembangan pariwisata lembah asri serang di desa serang kecamatan karangreja Kabupaten Purbalingga. *Prosiding seminar nasional geografi*, ISBN 978-602-361-243-7.
- Harsoyo. 2021. Analisis potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2, Juni 2021.
- Hermansyah, Nana, Agus Nurulsyam dan Edi Siswadi. 2019. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, hlm 288-293.
- Hossein, Bhenyamin. 1993, Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II Suatu Kajian Dsentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara, disertasi Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Hossein, Bhenyamin, 2001, “Transparansi Pemerintahan”, *Jurnal Inovasi*, November.
- Mawarni, Darmawan dan Abdullah Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah (Studi pada kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2. Hal 80-90
- Muliawan, H. 2008. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi.

- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana dan L.G.P. Sri Ekajayanti. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 7, Number 1, 2019, pp. 5 - 13.
- Syah, Firman. 2017. Strategi Pengembangan Desa Wisata. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank Ke-3, ISBN 9-789-7936-499-93
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah